

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia memiliki beberapa tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan tergambar melalui penyediaan layanan untuk masyarakat Indonesia. Penyediaan layanan yang dilakukan pemerintah menimbulkan konsekuensi berupa munculnya kebutuhan pendapatan yang kemudian akan direspon dengan pengeluaran/ belanja pemerintah. Urgensi pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas menjadi dasar pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terkait pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah dimana perhatian tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk reformasi keuangan negara.

Reformasi keuangan negara ditandai dengan terbitnya tiga paket Undang-Undang keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan dan belanja pemerintah merupakan bagian dari Keuangan Negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selain terbitnya tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara, pemerintah memiliki agenda reformasi lainnya, yaitu berupa peningkatan penggunaan sistem informasi pada layanan pemerintah. Agenda reformasi ini ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Terbitnya Instruksi Presiden tersebut sekaligus menjadi pertanda masuknya sistem pengelolaan keuangan pemerintah dalam era digitalisasi atau era industri 4.0. Berdasarkan *best practice* di dunia internasional pengelolaan keuangan negara harus selalu didukung oleh *information technology operational backbone* yang kuat, yang dinamakan *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)* (Sudarto, 2019). Di Indonesia sendiri, Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) telah mengembangkan suatu sistem yang terintegrasi dan telah diterapkan di seluruh satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang dikenal dengan nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

SAKTI merupakan bagian dari IFMIS yang digunakan secara *mandatory* oleh instansi pemerintah pusat pengelola dana yang bersumber dari APBN. Berdasarkan PMK Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, SAKTI adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran. SAKTI dibentuk untuk mendukung prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja. Agar dapat mewujudkan tujuan pembentukannya, SAKTI dilengkapi oleh fitur-fitur utama yang terdiri dari integrasi basis data, *single entry point*, menerapkan akuntansi berbasis akrual, dan jaminan keamanan data (Sihotang, 2020). Tidak berhenti sampai disitu, SAKTI juga dilengkapi oleh berbagai macam modul seperti modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, serta modul akuntansi dan pelaporan yang dipastikan dapat membantu SDM pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu SDM pemerintah yang turut terfasilitasi dengan kehadiran SAKTI adalah bendahara pengeluaran. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bendahara pengeluaran merupakan orang yang memiliki kewajiban untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/ daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor atau satuan kerja kementerian

negara/ lembaga/ pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bendahara pengeluaran akan menatausahakan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh instansinya dalam bentuk pembukuan dengan menggunakan Modul Bendahara yang berada pada aplikasi SAKTI.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di Kota Bogor dan menggunakan aplikasi SAKTI dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Bogor dapat diklasifikasikan ke dalam jenis KPPN Tipe A1. KPPN Tipe A1 memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Atas penjelasan di atas, penulis ingin melakukan tinjauan atas penerapan aplikasi SAKTI terhadap penatausahaan transaksi bendahara pengeluaran di KPPN Bogor . Tinjauan ini akan dilakukan untuk mengaitkan teori dan aturan yang ada dengan implementasinya di lapangan. Hasil dari tinjauan tersebut akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir penulis yang berjudul “Tinjauan Atas Implementasi Aplikasi SAKTI terhadap Penatausahaan Transaksi Bendahara Pengeluaran di KPPN Bogor ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka berikut adalah rumusan permasalahan yang akan menjadi acuan penulisan karya tulis ini.

- a. Bagaimana implementasi dari aplikasi SAKTI terhadap penatausahaan transaksi bendahara pengeluaran di KPPN Bogor ?
- b. Apakah penerapan Aplikasi SAKTI telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ?
- c. Apa saja kendala dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi SAKTI di KPPN Bogor ?
- d. Bagaimana cara bendahara pengeluaran KPPN Bogor mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

- a. Mempelajari bagaimana penatausahaan transaksi bendahara pengeluaran dengan menggunakan aplikasi SAKTI pada KPPN Bogor.
- b. Meninjau kesesuaian antara implementasi aplikasi SAKTI terhadap penatausahaan transaksi bendahara pengeluaran di KPPN Bogor dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Meninjau kendala dan permasalahan yang muncul pada implementasi aplikasi SAKTI dalam menatausahakan transaksi bendahara pengeluaran di KPPN Bogor.

- d. Mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil oleh bendahara pengeluaran di KPPN Bogor dalam mengatasi kendala dalam implementasi aplikasi SAKTI.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya Tulis ini berisi tinjauan atas implementasi aplikasi SAKTI terhadap penatausahaan transaksi bendahara pengeluaran di KPPN Bogor. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis membatasi pembahasan pada ruang lingkup penerapan aplikasi SAKTI dalam menatausahakan transaksi bendahara pengeluaran di KPPN Bogor. Penulis akan membahas menu-menu apa saja yang tersedia pada aplikasi SAKTI dan fungsi-fungsinya dalam menatausahakan transaksi bendahara pengeluaran di KPPN Bogor pada tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi KPPN Bogor dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan yang diharapkan dapat digunakan dalam hal yang berkaitan dengan pengimplementasian aplikasi SAKTI secara berkelanjutan.
- b. Membantu memberikan referensi bagi instansi pemerintah lainnya yang sedang turut ikut mengimplementasikan *e-government* terutama dalam hal penatausahaan bendahara pengeluaran.
- c. Menjadi sarana informasi dan tambahan literasi bagi pembaca dan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir terdiri dari empat bab dengan susunan pembahasan sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERSETUJUAN DARI TIM PENILAI KARYA TULIS TUGAS
AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5 Manfaat Penulisan

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian penatausahaan

2.2 Kedudukan dan Tanggung jawab bendahara pengeluaran

2.3 Aplikasi SAKTI

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Studi Kepustakaan

3.1.2 Wawancara

3.1.3 Observasi

3.2 Gambaran Umum KPPN Bogor

3.2.1 Sejarah Singkat KPPN Bogor

3.2.2 Visi dan Misi KPPN Bogor

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi KPPN Bogor

3.2.4 Struktur Organisasi KPPN Bogor

3.2.5 Implementasi Aplikasi SAKTI Terhadap Penatausahaan Transaksi Bedahara Pengeluaran di KPPN Bogor

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Tinjauan atas Implementasi Aplikasi SAKTI Terhadap Penatausahaan Transaksi Bendahara Pengeluaran di KPPN Bogor

3.3.2 Tinjauan atas Hambatan dalam Penerapan Aplikasi SAKTI di KPPN Bogor

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

RIWAYAT HIDUP PENULIS